

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran hukum pidana bagian I*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).
- Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Saptartha Jaya 1996).
- Andi Sofyan, Nur Azisa. *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016).
- Andi Rahmah dan Amiruddin Pabbu. *Kapita Selekta Hukum Pidana Edisi 2*. Jakarta: Wacana Media, 2015.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bambang waluyo, *Narapidana dan Proses Pemasyarakatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990).
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- E Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I: Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum Suatu Pembahasan Pelajaran Umum*. (Jakarta: Pustaka Tinta Mas, 2000).
- Febby Mutiara, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2020).
- H. Sukiyat. *Teori & Praktik Pendidikan Anti Korupsi*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020.
- Ishaq. *Hukum Pidana, edisi 1 cetakan 1*. Depok: Rajawali Pers 2020.

- Ismu Gunadi, Jonaedi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014).
- Lamintang, P. A. F, *Hukum penintensier Indonesia* (Bandung: Armico, cetakan III, 1988).
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mahus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Monica, D. R., & Diah Gustiniati, M. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2018).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985).
- Muladi, Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2010).
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1985).
- Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Pratiwi, S. (2022). *Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Binamulia Hukum.
- Ramelan. *Perluasan Ajaran Turut Serta Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Transnasional*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan Biro Hukum, 2009).
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1978).

Romli Atmasasmita, *Perubahan Stelsel Pidana dalam Rancangan KUHP Nasional (Suatu Perspektif Juridis Kriminologis dan Victimologis, Dalam Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologis*, (Bandung: Mandar Maju, 1995).

Suteki, dan Galang. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jawa Barat: Raja Grafindo Persada, 2020).

S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986).

Sudarto, *Kapita Selekta Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986).

Surachmin & Suhandi Cahaya. *Strategi & Teknik Korupsi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Teguh Praseto, *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.

W. J. S. Poerwadaminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

W. Riawan Tjandra. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Edisi Revisi* (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya. 2005).

Yahman, *Pengantar Hukum Acara Pidana*. (Surabaya: CV Penerbit qiara media, 2021.).

Jurnal

Abae, N. R., Nurfadilah, R., Maharani, D., & Medina, A. (2025). *Penerapan Teori Hukuman Jeremy Bentham dalam Kebijakan Pidana di Indonesia. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 3(02).

- Agusman Heri, “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan (Studi Putusan MA Nomor 2462/Pid.B/2017/PN Medan 2018)*,” *Jurnal Abdi Ilmu* 11, no. 2 (2019): hlm.131, <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/413>.
- Baehaqi, E. S. (2022). *Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana. An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*.
- Desiska, F., & Nurhadiyanto, L. (2025). *Analisis Pencucian Uang Hasil Tindak Korupsi Berdasarkan Convenience Theory*. IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora, 9(1), 361-369.
- Emmy Hafild. *Transparency International Annual Report, Transparency International*. Jakarta, 2004.
- Ilmi, E. (2023). *RATIO DECIDENDI PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DENGAN ALASAN MENJAUHI ZINA PERSPEKTIF TUJUAN PERKAWINAN DI INDONESIA (Studi Kasus Penetapan Nomor: 2041/Pdt. P/2020/PA. Kab. Malang)*. (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Muhammad Faizal Fuad. *Tinjauan Yuridis Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Pemberian Suap*. Fakultas Hukum Undip, 2025.
- Ningsih, D. M. K., Nugrahaningsih, W., & Rezi, R. (2025). *KEADILAN SUBSTANTIF DAN TEORI PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 15(11), 31-40.

- Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda, R. (2024). *Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(2), 64-71.
- Septiana, D. A. V., & Saputra, D. *Tinjauan Tentang Penerapan Dakwaan Kumulatif Subsidiar Oleh Penuntut Umum Dan Metode Pembuktiannya*. *Verstek*, 4(1).
- Simanjuntak, M. S. A., & Debora, D. (2024). *Prosedur Tentang Permohonan Upaya Hukum Banding Dalam Tindak Pidana*. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 6819-6832.
- Simanjuntak, G. F. (2023). *Ancaman pidana mati perspektif teori retributive dan teori utilitarianisme di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(1), 472-491.
- Trifena, Tony. *Analisis Yuridis Mengenai Unsur Merugikan Perekonomian Negara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Hukum, Lex Crimen Vol. IX/No. 3*.

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Website

Indonesia-Indeks Korupsi 1995-2024 Data.

<https://id.tradingeconomics.com/indonesia/corruption-index>.

Kinerja KPK 2020-2024: Tangani 2.730 Perkara Korupsi, Lima Sektor Jadi Fokus

Utama. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024-tangani-2730-perkara-korupsi-lima-sektor-jadi-fokus-utama>. Diakses pada 19 Desember 2024.

Sumber ilmu, hukum penintensier. Unjalu blogspot. co. id. 2 desember 2017.

Elly Delfia, Perubahan Makna pada Kata “Pelaku”.

[https://scientia.id/2022/07/10/perubahan-makna-pada-kata-pelaku/#:~:text=Kata%20pelaku%20dalam%20Kamus%20Besar,dan%20sebagainya\);%20yang%20merupakan.2022](https://scientia.id/2022/07/10/perubahan-makna-pada-kata-pelaku/#:~:text=Kata%20pelaku%20dalam%20Kamus%20Besar,dan%20sebagainya);%20yang%20merupakan.2022).

Idik Saiful Bahri. Mengenal Perbedaan Ratio Decidendi dan Obiter Dicta dalam

Putusan Hakim. [https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mengenal-perbedaan-ratio-decidendi-dan-obiter-dicta-](https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mengenal-perbedaan-ratio-decidendi-dan-obiter-dicta-03q#:~:text=Ratio%20decidendi%20adalah%20pertimbangan%20hukum,s)

[03q#:~:text=Ratio%20decidendi%20adalah%20pertimbangan%20hukum,s](https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mengenal-perbedaan-ratio-decidendi-dan-obiter-dicta-03q#:~:text=Ratio%20decidendi%20adalah%20pertimbangan%20hukum,s) sebagai%20dasar%20ahirnya%20putusan%20akhir.

Rafli Fadilah Achmad. Landmark Decision: Kerugian Lingkungan Bukan Rezim

Penegakan

Tipikor

<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/kerugian-lingkungan-bukan-rezim-penegakan-tipikor-0Tx>. 18 Februari 2026.